

DAFTAR PUSTAKA

- Adharya, Dicky. "Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan." *Tesis Universitas Indonesia*, (2018)
- Alifia, Khalila Zifa, Janitra Hudzaifah, dan Lasmaria Marito Sinabutar. "Tinjauan Yuridis Normatif Upaya Penyelesaian Sengketa Kepegawaian di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN.JBI)." *Dinamika Hukum* 25, no. 1 (2024).
- Ansori, Lutfil. "Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Jurnal Yuridis* 2, no. 1 (2015).
- Antony, Andhyca Moza Mahesa. "Fungsi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik." *JURNAL HAK: Kajian Ilmu Hukum, Administrasi Negara, dan Komunikasi* 2, no. 2 (2025).
- Ashfiya, Dzikry Gaosul. "Diskursus Pergeseran Konsep Diskresi Pasca Undang-Undang Cipta Kerja dan Pengujiannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Peratun* 6, no. 1 (Februari 28, 2023).
- Aulia, Dita, dkk. "Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai Media Pengawasan di Lingkungan Masyarakat." *Jurnal Serambi Hukum* 17, no. 1 (2023).

- Carter, David L. *Dimensi Teoritis dalam Penyalahgunaan Wewenang oleh Petugas Polisi*. 1999.
- Chandra, Febrian, Muhammad Azri, Rizki Apriadi Bahri, dan Tiara Ananda. “Pembuktian Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai Dasar Gugatan di PTUN.” *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 2 (2025).
- Dampaka, Y., dan A. Erliyana. “Penerapan Prinsip Transparansi AUPB terhadap Putusan Nomor 20/G/KI/2021/PTUN.SRG.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (2025).
- Fazlia, Shelly Asrika, Arrie Budhiartie, dan Fauzi Syam. “Menimbang Kembali Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Formulasi Kebijakan Publik.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (2025).
- Gandaria, Roberto Yanflor. “Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance dan Clean Government di Pemerintah Daerah.” *Lex Administratum* 3, no. 6 (2015).
- Henny Juliani. “Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.” *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 4 (2019).
- Huroiroh, Ernawati, Vera Rimbawani Sushanty, dan Wahidur Roychan. “Disharmonisasi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.” *Sosio*

Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial 2, no. 2 (Desember 4, 2022).

Ihfan, dan Awaludin Nur. “Problematika Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.” *Media Iuris* 7, no. 1 (2024).

Ikhsan, F., dan D. Sulastri. “Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai Tolak Ukur Normatif atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mewujudkan Reformasi Yudisial.” *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025).

Ilmar, Aminuddin. *Perbuatan Hukum Pemerintahan*. 2020.

Irawan, Soni. “Tinjauan Yuridis Pembagian Kekuasaan di Indonesia Berdasarkan Teori Trias Politica.” *Justici* 18, no. 2 (2025).

Khatimah, Husnul AR, Abd. Rahman, dan Muh. Rinaldy Bima. “Diskresi yang Menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.” *Journal of Lex Theory* 5, no. 1 (2024).

Makawimbang, Hernold Ferry. *Kerugian Keuangan Negara*. 2014.

Marshaal, Sri Suatmiati, dan Angga Saputra. *Hukum Acara Tata Negara Indonesia*. 2018.

- Mazjah, Kurdi Ibnu. "Pemisahan Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan: Studi Atas Implementasi Trias Politica Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (Januari 2025).
- Panjaitan, Bernat. "Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)." *Jurnal Ilmiah Advokat* 3, no. 2 (2015).
- Pratiwi, Cekli Setya, dkk. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. 2016.
- Putrijanti, Aju, Lapon T. Leonard, dan Kartika Widya Utama. "Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)." *Jurnal Mimbar Hukum* 30, no. 2 (2018).
- Ridwan. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. 2009.
- Rena Yulia, dan Duke Arie Widagdo. "Penyalahgunaan Wewenang: Perspektif Hukum Administrasi dan Viktimologi." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 10 (2024).
- Sari, Elidar, dan Hadi Iskandar. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. 2014.
- Septiana, Dila, dan Nunuk Nuswardani. "Perlindungan kepada Warga Negara melalui PTUN terhadap Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik." *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2024).
- Soetami, A. Siti. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. 2005.
- Solechan, S. "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019).
- Susiana, P. "Penyalahgunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan sebagai Dasar Gugatan di PTUN." (2025).

- Susilo, Agus Budi. “Makna dan Kriteria Diskresi Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Publik dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 1 (April 19, 2018).
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. 2003.
- Tobrani, Rahmad. “Pengujian Keputusan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Diskresi yang Dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.” *Jurnal Mercatoria* 11, no. 1 (Juni 28, 2018).
- Wahyudi, Ary, dan Hafizatul Ulum. “Kajian Penyalahgunaan Kewenangan Diskresi oleh Camat dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Indonesia.” *Jurnal Kompilasi Hukum* 10, no. 1 (2025).
- Walinono, Andi Muhammad Iqbal, A. Muin Fahmal, dan Satrih Hasyim. “Peranan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.” *Journal of Lex Theory* 6, no. 2 (2025).
- Widhi Antoro, Bibianus Hengky. “Pengujian Penyalahgunaan Wewenang di PTUN.” *Jurnal Yudisial* 13, no. 2 (2020).
- Widianugraha, P. “Tinjauan Normatif Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap Dikaitkan dengan Pembentukan Aturan Perundang-undangan.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019).